

MODEL PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN YANG BERKELANJUTAN

YUSTINA CHRISMARDANI

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal Bangkalan Madura

Email : yuschris@gmail.com

ABSTRAK

Untuk mengembangkan kewirausahaan secara utuh kepada mahasiswa dengan hasil akhir adalah terbentuknya wirausaha-wirausaha muda, maka diperlukan model pembelajaran kewirausahaan yang berkelanjutan. Model ini mengutamakan sinergi dari kebijakan pemerintah tentang pendidikan kewirausahaan dan pembentukan kurikulum yang memasukkan tahapan pengembangan kewirausahaan. Unsur pertama yaitu kebijakan pemerintah tentang pendidikan kewirausahaan. Kebijakan pendidikan kewirausahaan sudah tercetus sejak lama dan diikuti dengan berbagai program kewirausahaan yang bisa diakses oleh mahasiswa maupun pihak perguruan tinggi. Unsur kedua yaitu pembentukan kurikulum berdasarkan kewirausahaan. Kurikulum yang disusun sejak semester awal sampai akhir berdasarkan tahapan pengembangan kewirausahaan. Tahapan tersebut secara umum dapat dirancang sebagai berikut : (1) Tahap penanaman mindset kewirausahaan, (2) Tahap pengalaman bisnis, (3) Tahap start up business, (4) Tahap pengembangan bisnis.

Kata Kunci : pendidikan kewirausahaan, kurikulum

ABSTRACT

Developing entrepreneurship to the student, with the end result is the formation of young entrepreneurs, it needs a model of sustainable entrepreneurial learning. This model prioritizes the synergy of government policies on entrepreneurship education and the establishment of curricula that include entrepreneurship development stages. The first element is the government policy on entrepreneurship education. Entrepreneurship education policy has been sparked and is followed by a variety of entrepreneurial programs that can be accessed by students and the university. The second element is the establishment of a curriculum based entrepreneurship. Curriculum developed from the first semester until the end semester, based on the stage of entrepreneurship development. These stages can generally be designed as follows: (1) growing entrepreneurial mindset, (2) Stage of business experience, (3) business start up, (4) business development.

Key words ; entrepreneurship education, curriculum

PENDAHULUAN

Melambatnya ekonomi Indonesia mengakibatkan jumlah pengangguran dalam negeri bertambah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tahun ini (Februari 2014-Februari 2015) jumlah pengangguran di Indonesia meningkat 300 ribu orang, sehingga total mencapai 7,45 juta orang. Kepala BPS Suryamin mengatakan, angkatan kerja Indonesia pada bulan kedua, bertambah sebanyak 128,3 juta orang atau meningkat 6,4 juta orang dibanding Agustus 2014. Sedangkan dibanding Februari tahun lalu, bertambah sebanyak 3 juta orang. Suryamin mengatakan, penyebab bertambahnya pengangguran karena perlambatan ekonomi Indonesia. Pasalnya, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2015 sebesar 4,71% atau melambat

dibanding triwulan I/2014. Data BPS menjabarkan, bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) didominasi penduduk berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9,05%, disusul jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) 8,17 %, dan Diploma I/II/III sebesar 7,49%. Sementara, TPT terendah ada pada penduduk berpendidikan SD ke bawah dengan prosentase 3,61% di periode Februari 2015. Selama setahun terakhir TPT yang mengalami peningkatan yakni penduduk dengan pendidikan SMK 1,84 poin, Diploma I/II dan III sebesar 1,62 poin dan universitas 1,03 poin (Sindonews, 2015)

Dalam konteks itu, banyak pihak meyakini bahwa cara terbaik untuk menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia adalah dengan menciptakan wirausahawan-wirausahawan muda. Dalam sebuah kesempatan Menko Perekonomian Hatta Rajasa pernah berujar bahwa untuk dapat menjadi negara maju paling tidak jumlah wirausahawan Indonesia minimal dua persen dari jumlah total penduduk. Sayangnya, saat ini jumlah wirausahawan Indonesia masih kurang dari satu persen. Tidak ada satu pun negara maju tanpa ditopang kehadiran wirausahawan (Suar, 2012)

Negara-negara maju memiliki tingkat kewirausahaan yang tinggi, sehingga pertumbuhan ekonominya menjadi relatif lebih berkualitas,” tukas Deputy Gubernur BI Halim Alamsyah, dalam acara pelatihan wirausaha bagi mahasiswa di Gedung BI, Jakarta, Senin, 3 September 2012. Menurutnya, tingkat kewirausahaan Indonesia bahkan masih lebih rendah dibanding dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Singapura yang tingkat kewirausahaannya sudah di atas 4% (Infobank, 2012).

Membangun usaha secara mandiri, bagi sebagian penduduk Indonesia usia produktif masih menjadi pilihan nomor dua, dibandingkan dengan pilihan menjadi pekerja atau karyawan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM, A.A.G.N Puspayoga dalam pembukaan acara Wirausaha Muda Mandiri 2015 yang kembali digelar oleh Bank Mandiri. Dalam sambutannya, Puspayoga menghimbau agar perbankan, pemerintah dan akademisi bahu-membahu mendorong tumbuhnya wirausaha muda yang kreatif dan inovatif. Data Kementrian Koperasi dan UKM menunjukkan saat ini di Indonesia sudah tercatat 42 juta UKM, “Ini embrio wirausaha harus dibina jangan jalan sendiri-sendiri,” ungkap Puspayoga. Saat ini jumlah populasi wirausaha di Indonesia baru mencapai angka 0,43 % dari total populasi usia produktif, angka ini sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti Singapura yang jumlah wirausahanya sudah mencapai 7 %, Malaysia 5 %, dan Thailand 3 % (Swa, 2015).

Istilah wirausahawan merupakan terjemahan dari kata entrepreneur yang diartikan sebagai kegiatan individual atau kelompok yang membuka usaha baru dengan maksud memperoleh

keuntungan dan membesarkan usaha dalam bidang produksi maupun distribusi barang-barang ekonomi dan jasa. Berbicara mengenai kewirausahaan memang tidak dapat dilepaskan dari soal kemandirian bangsa. Kedua hal itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jika kuantitas dan kualitas kewirausahaan suatu negara baik, maka dapat dipastikan bahwa kemandirian negara bersangkutan baik pula. Kehadiran para wirausahawan penting untuk menopang keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi bangsa, seperti peningkatan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran.

Untuk itu, pemerintah harus mulai secara serius memberikan perhatian terhadap masalah kewirausahaan di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Diperlukan peran konkret pemerintah melalui penciptaan program pendidikan kewirausahaan bagi pemuda guna memberikan kesempatan belajar kepada mereka agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan (Suar, 2012).

Pendidikan kewirausahaan adalah suatu hal yang dibutuhkan bagi anak dan masyarakat. Karena hal itu sesuatu yang bermanfaat bagi usaha operasional program pembangunan nasional, maka sebagai prioritasnya perlu dimasukkan ke dalam muatan kurikulum sekolah. Bagi lembaga pendidikan, pembelajaran kewirausahaan bukan cuma menumbuhkan semangat, melainkan membangun konsep berfikir dan mendorong secara praktis kemampuan kewirausahaan pada lulusannya. Diharapkan adanya pembelajaran kewirausahaan mampu meningkatkan *softskill* peserta didik dan menghasilkan lulusan-lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja (*job creator*) bukan hanya sebagai pencari pekerjaan (*job seeker*).

Mengingat pentingnya pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat, khususnya mahasiswa maka Dirjen Pendidikan Perguruan Tinggi (DIKTI) sebagai lembaga yang menaungi pendidikan tingkat universitas memberlakukan program mata kuliah kewirausahaan yang harus diikuti oleh mahasiswa semua jurusan bidang studi. Hal ini diberlakukan sejak tahun 1997 (Murdjianto, 20016).

Sebagai respon akan kebutuhan pembentukan wirausaha-wirausaha baru, maka Universitas Trunojoyo Madura juga memberikan mata kuliah Kewirausahaan. Mata kuliah diberikan selama 1 semester dan dimaksudkan untuk membentuk jiwa kewirausahaan mahasiswa dan membimbing mahasiswa untuk menjadi *job creator*, bukan sebagai *job seeker*.

Desain pembelajaran yang diberikan adalah desain pembelajaran yang berorientasi atau diarahkan untuk menghasilkan *business entrepreneur* terutama yang menjadi *owner entrepreneur* atau calon wirausaha mandiri yang mampu mendirikan, memiliki dan mengelola perusahaan serta dapat memasuki dunia bisnis dan dunia industri secara profesional. Karenanya pola dasar

pembelajaran bersifat sistemik, yang didalamnya memuat aspek-aspek teori, praktek dan implementasi. Disamping itu dalam pelaksanaan pembelajaran hendaknya disertai oleh operasionalisasi pendidikan yang relatif utuh menyeluruh seperti pelatihan, bimbingan, pembinaan, konsultasi dan sebagainya. Akan tetapi dengan waktu pelaksanaan selama 1 semester, akan kah hasil yang diharapkan akan terwujud, yaitu terbentuknya wirausaha-wirausaha baru. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pembelajaran kewirausahaan yang berkelanjutan. Dengan mensinergikan berbagai pihak untuk membuat model pembelajaran kewirausahaan yang berkelanjutan.

METODE KAJIAN

Metode kajian ini dilakukan dengan cara sederhana melalui “analisis” dari berbagai dokumen sebagai sumber acuan yang terkait dengan peraturan perundangan-undangan yang relevan dengan pendidikan Kewirausahaan, pembahasan kewirausahaan dari jurnal, Panduan Pelaksanaan Kewirausahaan, Teori pendukung, dan hasil kajian Pendidikan Kewirausahaan di perguruan tinggi.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN

Dalam implementasi program pendidikan ke-wirausahaan, terdapat dua kebijakan terkait dengan kewirausahaan, yaitu: 1) kewirausahaan sebagai mata pelajaran di tingkat pendidikan menengah, dan sebagai mata kuliah pada jenjang pendidikan tinggi, serta 2) kewirausahaan sebagai keahlian yang mengacu pada standar kompetensi (Depdiknas, 2010; dalam Wiratno, 2012).

Untuk jenjang Perguruan Tinggi, pemerintah telah menetapkan beberapa program yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa. program-program tersebut meliputi Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), Program Kreativitas Mahasiswa bidang Kewirausahaan (PKMK).

Kedudukan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) merupakan bagian dari sistem pendidikan di perguruan tinggi yang telah diluncurkan semenjak tahun 2009. Dalam pelaksanaannya, PMW terintegrasi dengan pendidikan kewira-usahaan yang sudah ada, antara lain dengan: Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Kuliah Kerja Usaha (KKU) dan program kewirausahaan lain. Tujuan penyelenggaraan PMW dimaksudkan untuk: 1) menumbuhkan motivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa; 2) membangun sikap mental wirausaha, yakni:

percaya diri, sadar akan jati dirinya, bermotivasi untuk meraih suatu cita-cita, pantang menyerah, mampu bekerja keras, kreatif, inovatif, berani mengambil risiko dengan perhitungan, berperilaku pemimpin dan memiliki visi ke depan, tanggap terhadap saran dan kritik, memiliki kemampuan empati dan keterampilan sosial; 3) meningkatkan kecakapan dan keterampilan para mahasiswa khususnya *sense of business*; 4) menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi, 5) menciptakan unit bisnis baru yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan 6) membangun jejaring bisnis antarpelaku bisnis, khususnya antara wirausaha pemula dan pengusaha yang sudah mapan. Alokasi dana PMW tidak seluruhnya untuk modal mahasiswa. Mekanisme pelaksanaan program PMW diawali dengan: 1) melakukan sosialisasi kepada para mahasiswa; 2) identifikasi dan seleksi mahasiswa; 3) pembekalan kewirausahaan; 4) penyusunan rencana bisnis sambil magang di UKM. Selanjutnya, untuk mendapatkan dukungan permodalan dalam rangka pendirian usaha baru mahasiswa wajib mengajukan rencana bisnis yang layak untuk diseleksi oleh “Tim Seleksi” yang terdiri atas unsur perbankan, UKM, dan perguruan tinggi pelaksana. Pengusaha dilibatkan secara aktif untuk memberikan bimbingan operasional kewirausahaan. Keberadaan kelembagaan yang bertanggungjawab atas program-program pendidikan kewirausahaan merupakan salah satu pertimbangan penting bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memberikan dukungan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Dalam usaha mewujudkan calon-calon pengusaha muda dan terdidik atau pengusaha muda pemula, menumbuhkembangkan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi dapat dimulai melalui program Kuliah Kewirausahaan/KWU (Ditjen Dikti, 2009). Selama program PMW berjalan, perguruan tinggi bekerja sama dengan para pengusaha, baik dengan UKM Koperasi maupun perusahaan besar lainnya. Pengusaha dilibatkan secara aktif untuk memberikan bimbingan praktis kewirausahaan, dimulai dari pendidikan dan pelatihan, pema-gangan, menyusun rencana bisnis, dan pendam-pingan secara terpadu. Oleh karena itu, perlu dihindari terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara mahasiswa dan UKM pendamping. Sebaliknya, diperlukan adanya “sinergitas” antara jenis usaha yang dikembangkan mahasiswa dan jenis usaha yang dikembangkan oleh UKM pendamping.

Selain program-program khusus mahasiswa guna meningkatkan jiwa kewirausahaan, pemerintah melalui Kemenristek juga menyediakan program IbK, yang merupakan suatu program dengan misi menghasilkan wirausaha-wirausaha baru dari kampus, melalui program terintegrasi dengan kreasi metode yang diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi melalui Program Iptek bagi Kewirausahaan (IbK). Setiap perguruan tinggi berhak mengelola lebih dari satu program IbK

dengan melibatkan sejumlah dosen yang berpengalaman berwirausaha dari berbagai disiplin ilmu. IbK melaksanakan pembinaan kepada tenant melalui pelatihan manajemen usaha dan sejumlah kegiatan kreatif lainnya untuk menghasilkan wirausaha baru yang mandiri berbasis iptek. Tenant harus meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan produk di program studi masing-masing. Pengelola Program IbK juga disarankan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan, baik di dalam maupun di luar kampus, termasuk program Iptek bagi Kreativitas dan Inovasi Kampus (IbKIK) di perguruan tinggi masing-masing. Misi program IbK adalah memandu perguruan tinggi menyelenggarakan unit layanan kewirausahaan yang profesional, mandiri dan berkelanjutan, berwawasan *knowledge based economy*. Program IbK harus mandiri dan operasionalnya berkelanjutan, sehingga IbK diberi peluang untuk mampu menjadi unit profit. Dalam upaya menciptakan wirausaha baru mandiri yang berbasis iptek diharapkan sesuai dengan bidang ilmu pengusul. Program IbK dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan magang pada perusahaan yang mapan/unit-unit usaha/IbKIK di perguruan tinggi tersebut dan memfasilitasi mahasiswa dalam berwirausaha. Pelatihan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kewirausahaan, mendorong tumbuhnya motivasi berwirausaha, meningkatkan pemahaman manajemen (organisasi, produksi, keuangan, dan pemasaran) serta membuat rencana bisnis atau studi kelayakan usaha. Kegiatan magang pada perusahaan/unit-unit usaha/IbKIK dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktis kewirausahaan kepada mahasiswa dengan cara ikut bekerja sehari-hari pada unit usaha tersebut. Mahasiswa yang telah mulai berwirausaha, mahasiswa Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) lainnya, Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), mahasiswa yang berminat dan sedang merintis usaha, dan alumni yang berminat atau baru merintis usaha bisa menyempurnakan kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan sebelumnya, untuk meningkatkan usahanya. Pengelola Program IbK perguruan tinggi disarankan untuk menggali jenis komoditas bisnis para *tenant* sesuai dengan bakat dan tidak hanya sekedar terpaku pada minatnya. Unit layanan program IbK setiap tahun wajib membina 20 orang calon wirausaha yang seluruhnya adalah mahasiswa PKMK/PKM lainnya, mahasiswa yang merintis usaha baru dan alumni. Program IbK diharapkan juga bersinergi dengan bidang kemahasiswaan perguruan tinggi untuk merekrut mahasiswa yang mendapatkan PKMK atau PKM lainnya, mahasiswa ndan alumni yang sedang merintis usaha sebagai *tenant* (Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat, 2016).

Dengan berbagai program yang ada, pemerintah telah berusaha untuk mendorong pengembangan kewirausahaan dilingkungan kampus, menciptakan sinergi antara mahasiswa, akademisi, praktisi dan UKM untuk bekerja sama menciptakan lapangan kerja baru dan membentuk mahasiswa sebagai *job creator*.

KURIKULUM YANG BERBASIS KEWIRAUSAHAAN

Unsur selanjutnya yang menjadi penentu keberhasilan pengembangan kewirausahaan adalah kurikulum yang diberlakukan di perguruan tinggi. Keberhasilan pendidikan atau pembelajaran kewirausahaan di perguruan tinggi juga sangat tergantung pada kurikulum yang digunakan. Bila kurikulum kewirausahaan yang disusun sudah tepat dan sesuai dengan tujuan pendidikan kewirausahaan yang ingin dicapai maka dapat dikatakan pendidikan kewirausahaan itu berhasil. Kelemahan dalam pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi selama ini diantaranya adalah kurikulum atau materi yang diajarkan dalam mata kuliah kewirausahaan baru sebatas teori di dalam kelas. Dengan kata lain materi yang diajarkan dalam mata kuliah kewirausahaan tersebut belum mampu menumbuhkan, menanamkan, serta menguatkan nilai-nilai kewirausahaan dalam diri mahasiswa yang tidak mungkin dapat dipenuhi hanya secara teori (Kasih, 2013).

Dalam merancang kurikulum kewirausahaan (mata kuliah/materi) harus diperhatikan nilai-nilai kewirausahaan apa saja yang harus diberikan kepada mahasiswa. Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa terdapat nilai-nilai dan perilaku yang terkandung dalam jiwa kewirausahaan. Seorang wirausaha adalah seseorang harus mempunyai kemampuan untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis yang ada, kemudian melakukan inventarisasi dan mengatur sumber daya yang dapat diusahakan serta mengambil tindakan yang tepat untuk meraih keberhasilan dalam mengisi kesempatan bisnis tersebut. Sehubungan dengan itu, Meredith (1993) menyatakan bahwa profil seorang wirausaha harus memiliki ciri-ciri dan watak (1) percaya diri, adanya keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri sehingga tidak bergantung kepada pihak lain serta bersikap optimis; (2) berorientasi pada tugas dan hasil, yakni memiliki tuntutan atau kebutuhan terhadap prestasi yang tinggi, bekerja keras, ulet, tekun, tabah, energik, dan mempunyai inisiatif yang tinggi; (3) mengambil risiko, dengan pengertian mempunyai keberanian untuk mengambil risiko atas kegagalan usaha, bertanggungjawab serta senang pada kegiatan usaha yang bersifat menantang; (4) tidak mudah puas, yakni selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi dan mengadakan penemuan baru serta bertindak sebagai pioner.

Sementara itu, Siagian (1995) berpendapat bahwa kualifikasi dasar bagi pengusaha yang baik atau wiraswasta yang handal adalah sebagai berikut:

1. Memiliki rasa percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi;
2. Mau dan mampu mencari dan menangkap peluang usaha yang menguntungkan;
3. Mau dan mampu bekerja keras dan tekun dalam menghasilkan barang dan jasa serta mencoba cara kerja yang lebih tepat dan efisien;
4. Mau dan mampu berkomunikasi, tawar-menawar, dan musyawarah dengan berbagai pihak yang besar pengaruhnya pada kemajuan usaha;
5. Menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat dan disiplin;
6. Mencintai kegiatan usahanya secara lugas dan tangguh tetapi cukup luwes.
7. Mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan memanfaatkan dan memotivasi orang lain; dan
8. Berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan serta menggalang kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak terhadap perusahaan

Ciri dan karakteristik wirausaha diatas telah menggambarkan bahwa seorang wirausahawan adalah seorang yang kreatif dan inovatif, tangguh, ulet dan mempunyai visi untuk selalu maju dan berkembang. Dengan memiliki karakteristik yang demikian, seseorang yang mempunyai usaha, dapat dikatakan sebagai wirausahawan (*entrepreneur*), akan tetapi bila hanya mempunyai usaha, sedangkan tidak ada keinginan untuk maju dan berkembang, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai seorang wirausahawan (*entrepreneur*).

Sementara itu, Alberti et al (2004) dalam studinya mengenai pendidikan kewirausahaan yang mengacu pada Vesper (1998) menjelaskan ada empat macam pengetahuan yang berguna bagi wirausaha, yaitu (1) pengetahuan secara umum tentang bisnis, (2) pengetahuan tentang perusahaan, (3) pengetahuan khusus tentang peluang bisnis, (4) pengetahuan khusus tentang perusahaan atau usaha. Selain itu, Bygrave (1994) mengajarkan pada mahasiswa tentang proses kewirausahaan, pengenalan peluang, strategi memasuki bisnis, peluang pasar dan pemasaran, pembuatan rencana bisnis yang sukses, proyeksi keuangan, modal usaha, pembiayaan dalam bentuk hutang dan lainnya, bantuan eksternal untuk memulai usaha dan bisnis kecil, hukum dan isu-isu pajak, hak kekayaan intelektual, franchising, harvesting dan ekonomi kewirausahaan.

Pada umumnya di perguruan tinggi yang ada di tanah air menyelenggarakan matakuliah kewirausahaan, walaupun intensitas dan proporsinya mungkin berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan pengamatan di beberapa PTN didapati suatu kesimpulan bahwa tidak semua jurusan

menyajikan matakuliah atau pendidikan kewirausahaan sebagai matakuliah yang berdiri sendiri. Fakta lain, jurusan-jurusan yang menyajikan matakuliah/pendidikan kewirausahaan, substansi materi yang disajikan dalam mata kuliah kewirausahaan relatif telah memadai (Siswoyo, 2009). Dengan beban SKS sebesar 2 – 3 SKS, mata kuliah Kewirausahaan diberikan sebagai mata kuliah mandiri yang tidak bersinergi dengan mata kuliah lainnya. Berbeda halnya dengan universitas-universitas yang mencanangkan dirinya sebagai *entrepreneurship based university* (EU), universitas ini memasukkan kurikulum kewirausahaan mulai dari semester 1 sampai dengan akhir. Seperti halnya Universitas Ciputra, Universitas Ma Chung dan Universitas Prasetia Mulya. Kurikulum disusun dengan tujuan akhir adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai usaha sendiri.

Universitas Ciputra dan Universitas Ma Chung mempunyai kemiripan dalam penyusunan kurikulumnya. Kurikulum kewirausahaan disusun sejak semester 1 hingga akhir seperti sebuah siklus hidup (*life cycle*). Kurikulum ini terintegrasi antara knowledge dan skills. Target akhirnya adalah menghasilkan lulusan yang dapat menghasilkan lapangan pekerjaan. Karenanya universitas mewajibkan mahasiswa untuk memiliki usaha sendiri. Untuk mencapai tujuan akhir tersebut, maka universitas menyediakan satu hari yang dikhususkan belajar kewirausahaan dengan penekanan pada *experience learning*, seperti cara berjualan.

Senada dengan kedua universitas diatas, Universitas Prasetia Mulya melakukan pengembangan kurikulum kewirausahaan dengan tiga *learning goals* dalam pengajaran, yaitu *knowledge*, karakter dan *social awareness*. Pengembangan kurikulum kewirausahaan seperti tahapan-tahapan dalam bisnis, yaitu mulai dari *scan the environment*, menerjemahkan kreativitas dalam *plan*, simulasi bisnis, *social entrepreneurship* hingga *community development*. Proses pembelajaran mahasiswa Prasetia Mulya terdiri dari tiga tahap yaitu :

1. *exercising the concepts through the projects*,
2. *theorizing the experience*,
3. *running the own business*.

Selain ketiga universitas diatas, UNS Solo juga menerapkan kurikulum berbasis kewirausahaan (Kasih, 2013). Proses pembelajaran kewirausahaan di UNS Solo terdiri dari 9 tahap kegiatan yang disusun secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari semester I sampai dengan semester VIII. Tahapan tersebut meliputi :

1. Pengembangan softskill mahasiswa

Pada tahap ini dimulai dengan pengenalan tentang pentingnya *soft-skill* kepada mahasiswa

baru pada saat orientasi mahasiswa baru, mahasiswa semester I dan II diberikan pelatihan AMT dan dilanjutkan secara bertahap pada semester III sampai dengan semester VI. Kegiatan yang diberikan adalah : pemetaan potensi diri mahasiswa dan pelatihan AMT lanjut dan *outbound training* (Semester III); pelatihan leadership, pelatihan manajemen bisnis dan pelatihan entrepreneurship (Semester IV); lomba PKM, KKTM, lomba penalaran, workshop film pendek, robot kreatif, dan kewirausahaan mahasiswa (Semester V); seminar, pameran produk, dan publikasi karya (Semester VI).

2. Kuliah kewirausahaan

Pada tahap ini mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah kewirausahaan dengan bobot 2 SKS, dilaksanakan pada semester II dan III dalam waktu satu semester. Materi yang diberikan terdiri dari : pemahaman teoritis, motivasi kewirausahaan, mengundang pembicara pakar kewirausahaan, kuliah tamu dari pengusaha, dan studi ke usaha kecil dan menengah.

3. Bimbingan karir kewirausahaan

Pada tahap ini mahasiswa diberikan kesempatan secara sukarela mengikuti bimbingan karir yang merupakan ko-kurikuler yang dilaksanakan pada semester II, III atau IV dalam waktu beberapa hari tergantung jenis bimbingan yang diperlukan.

4. Magang kewirausahaan

Pada tahap ini mahasiswa mengikuti kegiatan magang kewirausahaan yang merupakan kegiatan ko-kurikuler sehingga sifatnya sukarela. Kegiatan magang ini dilaksanakan pada semester IV, V, atau VI dalam waktu satu sampai tiga bulan.

5. Bimbingan PKM Kewirausahaan

Kegiatan ini merupakan kegiatan ko-kurikuler yang sifatnya sukarela yang dilaksanakan pada semester IV, V, atau VI dalam waktu dua bulan. Dalam kegiatan ini mahasiswa memperoleh pelatihan penyusunan dan pembimbingan proposal bidang kewirausahaan yang akan dikirimkan ke DIKTI maupun LPPM UNS.

6. Inkubator WUB (Wirausaha Baru)

Inkubator WUB merupakan kegiatan ko-kurikuler dan sifatnya sukarela. Mahasiswa dapat memanfaatkan layanan dari inkubator berupa pengembangan UMKM-K dalam bentuk pendampingan secara intensif melalui informasi, konsultasi, serta diklat pengembangan bisnis.

7. Kuliah Kerja Pemberdayaan Masyarakat (KKPM)

KKPM merupakan program kegiatan kuliah kerja tematik yang termasuk kegiatan intra kurikuler pilihan dengan bobot 2 SKS hanya untuk peserta mahasiswa S1 yang telah

menyelesaikan minimal 110 SKS. Kegiatan ini dilaksanakan pada semester VI, VII atau VIII, dalam waktu 1,5 bulan.

8. Bantuan penelitian kewirausahaan

Kegiatan ini merupakan kegiatan ko-kurikuler dan bersifat suka rela dengan peserta mahasiswa S1 dan dilaksanakan pada semester VII atau VIII dalam waktu tiga sampai enam bulan. Kegiatan ini meliputi : bimbingan penyusunan skripsi bidang kewirausahaan, penulisan artikel ilmiah bidang kewirausahaan, penelitian bidang kewirausahaan, dan seminar hasil penelitian kewirausahaan.

9. Program COOP (Cooperative Academic Education)

Program ini merupakan kegiatan ko-kurikuler dan bersifat sukarela dengan peserta mahasiswa S1, dilaksanakan pada semester VII atau VIII dalam waktu tiga bulan. Dalam program ini mahasiswa dapat mengikuti praktek kerja langsung secara *full time* di salah satu Badan Usaha. Mahasiswa peserta memperoleh kompensasi berupa biaya transportasi dan penginapan sesuai dengan standar UMR yang berlaku serta surat keterangan bekerja.

MODEL PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN YANG BERKELANJUTAN

Untuk menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan, berbagai universitas dengan local wisdom dan nilai tambah keunikan tersendiri, telah membuat kurikulum kewirausahaan. Ada perguruan tinggi yang hanya menerapkan kurikulum kewirausahaan sebagai mata kuliah 2-3 SKS, ada pula perguruan tinggi yang menggunakan kurikulum kewirausahaan yang terintegrasi dari semester awal sampai dengan terakhir. Dengan mempertimbangkan visi dan misi perguruan tinggi, maka setiap perguruan tinggi dapat memilih dan membentuk kurikulum berdasarkan kewirausahaan atau hanya memberikan kuliah kewirausahaan yang diberikan selama satu semester.

Apabila pilihannya adalah memberikan pengembangan kewirausahaan secara utuh kepada mahasiswa dengan hasil akhir adalah terbentuknya wirausaha-wirausaha muda, maka diperlukan model pembelajaran kewirausahaan yang berkelanjutan. Model ini mengutamakan sinergi dari kebijakan pemerintah tentang pendidikan kewirausahaan dan pembentukan kurikulum yang memasukkan tahapan pengembangan kewirausahaan.

Unsur pertama yaitu kebijakan pemerintah tentang pendidikan kewirausahaan. Kebijakan pendidikan kewirausahaan sudah tercetus sejak lama dan diikuti dengan berbagai program kewirausahaan yang bisa diakses oleh mahasiswa maupun pihak perguruan tinggi.

Unsur kedua yaitu pembentukan kurikulum berdasarkan kewirausahaan. Kurikulum yang disusun sejak semester awal sampai akhir berdasarkan tahapan pengembangan kewirausahaan. Tahapan tersebut secara umum dapat dirancang sebagai berikut :

1. Tahap penanaman mindset kewirausahaan

Tahap ini dilakukan di semester awal dengan tujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, mengubah pola pikir, menumbuhkan minat dan motivasi untuk berwirausaha.

2. Tahap pengalaman bisnis

Pada tahap ini mahasiswa sudah mulai untuk menerjemahkan konsep menjadi sebuah business plan.

3. Tahap start up business

Tahap ini meliputi implementasi dari business plan yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya.

4. Tahap pengembangan bisnis

Pada tahap akhir ini, mahasiswa dapat membuat tugas akhir berupa business plan untuk pengembangan bisnis yang sudah dimulainya.

Keempat tahapan dalam kurikulum kewirausahaan ini dapat merupakan kerjasama antara pihak perguruan tinggi, pemerintah dan swasta (UKM dan perbankan). Oleh karena itu akan lebih tepat apabila setiap perguruan tinggi yang mencanangkan diri sebagai *Entrepreneurial Campus* membangun dan mengembangkan hal-hal sebagaimana diungkapkan oleh Heri Kuswara (2012) dalam Kasih (2013), yang meliputi :

- a. Menyusun Kurikulum

Perguruan tinggi harus dengan sungguh-sungguh mendesain mata kuliah / materi kewirausahaan meliputi pembuatan silabus, satuan acara perkuliahan (SAP), slide presentasi, modul teori, modul praktikum praktek, dan pembuatan buku panduan. Idealnya dalam merumuskan kurikulum perguruan tinggi

melibatkan praktisi / pelaku usaha dan motivator agar menghasilkan konsep dan gagasan kewirausahaan yang tepat dan sesuai dengan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu.

- b. Peningkatan SDM dosen

Perguruan tinggi harus mampu mempersiapkan tenaga pengajar / dosen yang mampu "5 M" yaitu :

1. Mampu memberikan paradigm baru kewirausahaan

2. Mampu merubah / mengarahkan mindset mahasiswa menjadi seorang yang berjiwa entrepreneurship
3. Mampu menginspirasi dan memotivasi mahasiswa menjadi SDM yang mandiri
4. Mampu memberikan contoh karya nyata kewirausahaan (barang/jasa) dan menyuguhkan *succes story*
5. Mampu menghasilkan SDM mahasiswa / alumni menjadi seorang *intrapreneur* atau *entrepreneur* sukses.

c. Membentuk *Entrepreneurship Centre*

Perguruan tinggi harus mampu membentuk Pusat Kewirausahaan (*entrepreneurship centre*) sebagai wadah yang menaungi dan mengelola berbagai kegiatan kewirausahaan mahasiswa dan dosen. Lembaga ini juga akan menjadi fasilitator dan mediator dengan pihak luar (*stakeholders*) untuk menjalin dan mengembangkan kerjasama agar kegiatan kewirausahaan di kampus maju dan berkembang.

d. Kerjasama Dengan Dunia Usaha

Perguruan tinggi harus mampu menjalin dan membina hubungan kerjasama dengan dunia usaha. Kerjasama ini ditujukan untuk (1) meningkatkan kualitas SDM dosen dan mahasiswa, (2) membuka peluang magang usaha bagi mahasiswa dan dosen, (3) membuka peluang kerjasama usaha khususnya untuk mahasiswa / alumni. Dengan kerjasama ini mahasiswa/alumni memperoleh transfer ilmu dan pengalaman dari para pengusahasecara langsung yang sangat bermanfaat bila kelak terjun ke dunia usaha.

e. Membentuk Unit Usaha

Perguruan tinggi harus mampu membentuk unit-unit usaha yang dapat dikelola oleh mahasiswa dan dosen sebagai wadah organisasi bisnis tempat menimba pengalaman berbisnis secara langsung. Bentuk atau jenis bisnis dapat disesuaikan dengan minat dan kemampuan mahasiswa dan dosen serta sesuai dengan kemampuan perguruan tinggi.

f. Kerjasama Dengan Institusi Keuangan (Perbankan/Non Perbankan)

Perguruan tinggi harus mampu menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Tujuan yang akan dicapai dengan kerjasama ini adalah agar mahasiswa yang akan membuka usaha dapat diberikan kemudahan dalam mengakses modal usaha.

g. *Entrepreneurship Award*

Perguruan tinggi harus mampu pula mendorong dan meningkatkan semangat berwirausaha, sekaligus mendidik semangat berkompetisi secara fair di kalangan mahasiswa.

Kompetisi dalam kegiatan kewirausahaan diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi mahasiswa sehingga muncul minat dan ketertarikan menjadi wirausaha setelah lulus kuliah.

SIMPULAN DAN SARAN

Untuk mengembangkan kewirausahaan secara utuh kepada mahasiswa dengan hasil akhir adalah terbentuknya wirausaha-wirausaha muda, maka diperlukan model pembelajaran kewirausahaan yang berkelanjutan. Model ini mengutamakan sinergi dari kebijakan pemerintah tentang pendidikan kewirausahaan dan pembentukan kurikulum yang memasukkan tahapan pengembangan kewirausahaan. Unsur pertama yaitu kebijakan pemerintah tentang pendidikan kewirausahaan. Kebijakan pendidikan kewirausahaan sudah tercetus sejak lama dan diikuti dengan berbagai program kewirausahaan yang bisa diakses oleh mahasiswa maupun pihak perguruan tinggi. Unsur kedua yaitu pembentukan kurikulum berdasarkan kewirausahaan. Kurikulum yang disusun sejak semester awal sampai akhir berdasarkan tahapan pengembangan kewirausahaan. Tahapan tersebut secara umum dapat dirancang sebagai berikut : (1) Tahap penanaman mindset kewirausahaan, (2) Tahap pengalaman bisnis, (3) Tahap start up business, (4) Tahap pengembangan bisnis

Setiap perguruan tinggi mempunyai visi dan misi yang berbeda, berbasis pada hal tersebut dan mensinergikan dengan local wisdom dan nilai tambah yang unik, dapat dieancang kurikulum kewirausahaan yang berkelanjutan untuk mencetak wirausaha-wirausaha baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2009. *Pedoman Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Dikti*. Jakarta: Direktorat Kelembagaan.
- Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2016. *Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi. Edisi X Tahun 2016*. Jakarta : Dirjenristekdikti.
- Kasih. Yulizar. 2013. Mewujudkan Pendidikan Kewirausahaan Di Perguruan Tinggi Melalui Proses Pembelajaran yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah MDP*. Vol 2. No. 2 Maret 2013.
- Meredith, Geoffrey, G. 1993. *Kewirausahaan Teori dan Praktik*, Seri Manajemen No. 97 Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Murdjianto dan Aliaras Wahid. 2006. *Membangun Karakter dan Kepribadian Kewirausahaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Siagian , Salim. 1995. *Kewirausahaan Indonesia Dengan Semangat 17-08-45*, Jakarta: Puslatpenkop Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
- Siswoyo, B.B. 2009. *Kewirausahaan dalam Kajian Dunia Akademik*. FE UM.
- Wiratno. Siswo. 2012. Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan di Pendidikan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 18 No. 4 tahun 2012.